



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SEJATI DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BERDASARKAN
PERATURAN DESA KUNDUR NOMOR 4 TAHUN 2017
DI DESA KUNDUR KECAMATAN TEBING
TINGGI BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**ALDE WISSIANA
NIM. 11727200002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul : **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SEJATI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA KUNDUR NOMOR 4 TAHUN 2017 DI DESA KUNDUR KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”** yang ditulis oleh :

Nama : Alde Wissiana
 Nim : 11727200002
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 September 2021

Pembimbing Skripsi

**Dr. Muhammad Darwis, SHI, S.H.,
 M.H**

NIK. 197802272008011009

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Badan Usaha Bina Usaha Sejati dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kunder Nomor 4 Tahun 2017 di Desa Kunder Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**, yang ditulis oleh :

Nama : Alde Wissiana
 NIM : 11727200002
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji I

Nurhidayat, SH., MH

Penguji II

Lysa Anggraini, SH., MH



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alde Wissiana

NIM : 11727200002

Tempat/Tgl. Lahir : Selatpanjang, 16 April 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan
Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 di
Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten
Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 November 2021

Yang membuat pernyataan



Alde Wissiana.

NIM : 11727200002

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alde Wissiana (2021): Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 bahwa BUMDes merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Desa yang bertujuan untuk mewujudkan kestabilan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri serta dapat menggali potensi lokal untuk mengembangkan produktivitas usaha pedesaan. Sedangkan dalam pelaksanaannya pihak BUMDes Bina Usaha Sejati terlihat belum begitu memaksimalkan program program yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran BUMDes Bina Usaha Sejati di Desa Kundur dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan tujuan dari pendirian BUMDes yang tertera pada Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 dan apa saja yang menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran BUMDes Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum empiris. Dengan metode pendekatan efektivitas hukum. Sumber data yang digunakan mencakup sumber primer yaitu: hasil wawancara responden penelitian dan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017, sumber sekunder yaitu: buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian, dan sumber tersier yaitu: karya tulis ilmiah, jurnal, *website*, kamus. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menarik kesimpulan secara induktif.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan pendapatan asli desa Kundur telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes yang tertera dalam Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu : *Pertama*, Sebagian masyarakat yang masih kurang peduli terhadap BUMDes. *Kedua*, Terbatasnya tenaga kerja. Terjadinya penambahan tenaga kerja dikhawatirkan akan menambah dana pengeluaran, hal itu dikhawatirkan dapat menghambat jalannya BUMDes tahun-tahun kedepannya.

Kata Kunci : Peran, BUMDes, Pendapatan Asli Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Bisman), Ibunda (Misdalifa) dan adik-adik penulis (M. Zickry Romadhan dan Akhbar Maulana) yang tak lelah melangitkan do'a dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan do'a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, SH., MH yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah., MA selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Staff Pemerintah Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Ilmu Hukum, terutama Ilmu Hukum Kelas B angkatan 2017 terkhusus Aprilia Dwidhasmarani Putri yang telah bersedia untuk direpotkan, memberi bantuan serta memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Alifa House yakni Sherly Andriani, Ferdawati Putri, Nelly Yana, Nurkhasanah, Safitri, dan Julia yang telah banyak menghibur dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Kepada Teman-teman pendakian yang menjadi bagian berarti dalam hidup penulis sebagai partner healing terbaik melepas segala penat menghadapi drama perskripsian dengan pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan.

11. Untuk seluruh keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 1 September 2021
Penulis

Alde Wissiana
NIM 11727200002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	19
1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	19
2. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti	21
3. Kondisi Demografi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	22
B. Gambaran Umum Desa Kundur	23
1. Sejarah Desa Kundur	23
2. Kondisi Geografis Desa Kundur.....	24
3. Kondisi Demografi Desa Kundur	24
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pemerintahan Daerah.....	30
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	30
2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah	33
B. Sistem Pemerintahan Desa	34
C. Sumber Pendapatan dan Belanja Keuangan Desa	41
D. BUMDes Sebagai Sektor Pendapatan Desa	47
E. Hubungan BUMDes dan PAD	51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Kunder Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa 54
- B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa..... 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Saran 68

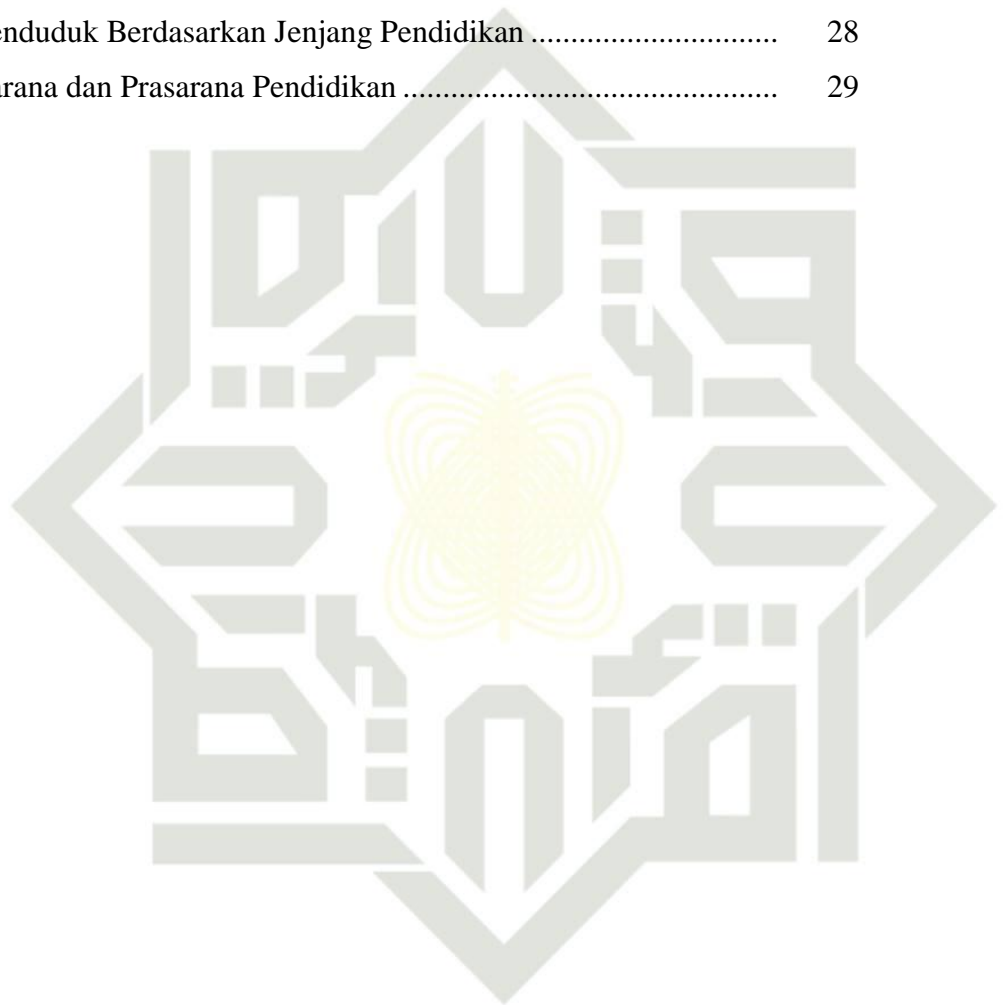
DAFTAR PUSTAKA DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

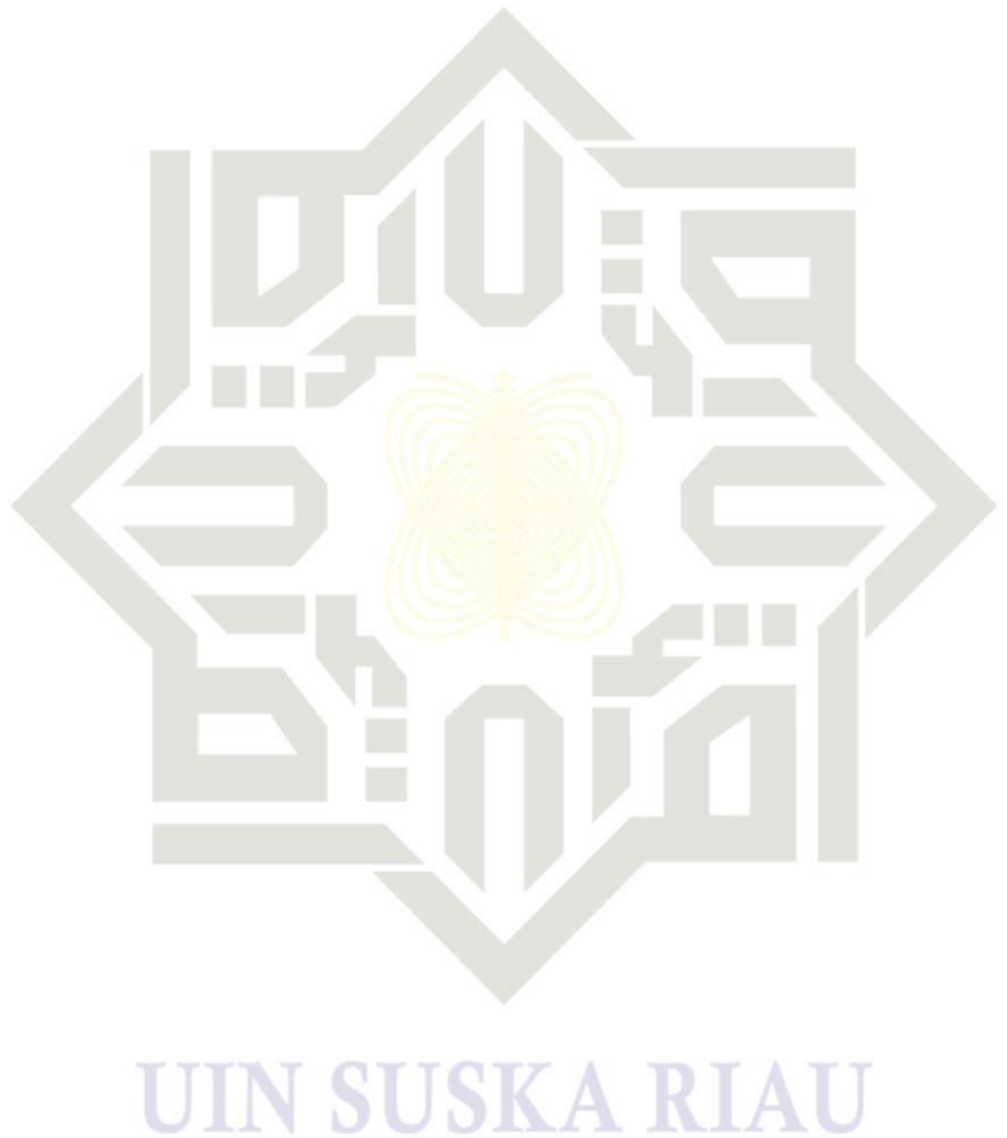
Tabel I.1	Populasi dan Sampel	13
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel II.2	Agama Desa Kundur	26
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	27
Tabel II.4	Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	28
Tabel II.5	Sarana dan Prasarana Pendidikan	29



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Kabupaten Kepulauan Meranti	21
----------------------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu daerah atau wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk secara bersama, dan masyarakat dapat menggunakan lingkungan desa untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya, yang mempunyai organisasi pemerintahan di bawah Kecamatan. Desa juga biasanya dikenal mempunyai berbagai macam karakteristik fisik maupun sosial, yang memperlihatkan adanya kesatuan di antara unsur-unsurnya.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengertian Desa yakni, Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat perlu diadakan Badan Usaha Milik Desa untuk menunjang kemajuan desa dan Pendapatan Asli Desa.²

Sedangkan pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada Desa yang berbunyi: Desa dapat mendirikan Badan Usaha

¹ Ramlan dan Eka Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Medan : Enam Media, 2021), h.

² Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tahun 2014, BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di Desa untuk meningkatkan perekonomian Desa, peningkatan pendapatan Desa, meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.³

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dan pemerintahan Desa, dengan adanya BUMDes pemerintah Desa dan masyarakat Desa bisa menggali berbagai potensi yang ada. BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap Desa. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang memiliki masing-masing Desa. Maka BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMDes suatu lembaga yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui

³ Sofyani Hafiez. *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2020. JIA. Volume 5, Nomor 2. h 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penawaran sumber daya lokal (Barang atau Jasa) ke pasar.

Budiono menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat Desa adalah pemerintah Desa diberikan kewenangan oleh Pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat Desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa.⁴

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.⁵

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dalam bentuk pendapatan asli desa. BUMDes mengelola aset ekonomi yang ada di Desa bersama dengan masyarakat Desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli Desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif,

⁴ Budiono P. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kutoarjo)*. Jurnal Politik Muda. 2015. h 116-125.

⁵ Gunawan, K. *Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi*. Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi. 2011. h 61-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

emansifatif, transparasi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, propesional, dan mandiri. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan BUMDes adalah dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.⁶

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes adalah:

1. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
2. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
5. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan

⁶ Ery Yusuf Agunggunanto dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Volume 13., Nomor. 01., (2015) h.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.⁷

Tujuan pendirian BUMDes ‘Bina Usaha Sejati’ di Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

1. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan.
3. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Desa.
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.
5. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.⁸

BUMDes Bina Usaha Sejati Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai belum mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli Desa Kundur dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta mengelola dan kurangnya ajakan dari pihak BUMDes kepada masyarakat

⁷ Ridlwan, Z. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8., Nomor. 3., (2014) h. 424.

⁸ Lihat Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan program BUMDes di Desa Kundur. Salah satunya dalam program usaha BUMDes Bina Usaha Sejati yakni olahan air gambut. Usaha pada bidang pengolahan air gambut ini dinilai belum mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi air minum dari pengolahan air gambut tersebut. Data Pendapatan Asli Desa yang hanya diperoleh dari BUM Desa Bina Usaha sejati pada tahun 2020 berjumlah Rp. 6.300.000.

Berdasarkan tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Peraturan Desa Kundur tentang BUMDes tersebut, penulis melihat bahwa tujuan-tujuan dari BUMDes ini belumlah terealisasi secara keseluruhan, terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa. Hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya peran pelaksana BUMDes dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan tersebut, baik peran oleh pengelola BUMDes maupun peran masyarakat secara umum.

Tujuan seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa berdirinya BUMDes ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapat Asli Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi Desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut bahwa betapa penting dan terkaitnya suatu peraturan dengan individu di dalam masyarakat suatu wilayah, karena peraturan adalah salah satu kebutuhan individu untuk dapat menanggulangi permasalahan dalam suatu lingkup yang menyangkut lingkup sosial. Manusia membutuhkan suatu peraturan untuk mencapai keteraturan.⁹ Begitu juga di dalam sebuah Desa yang tidak luput dari Peraturan Desa yang dibuat oleh perangkat Desa khususnya peraturan mengenai BUM Des guna meningkatkan nilai guna atas asset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SEJATI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA KUNDUR NOMOR 4 TAHUN 2017 DI DESA KUNDUR KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu ditetapkan, agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah. Penulis membatasi ruang

⁹ Ivan Masdudin, *Peraturan dan Keteraturan*, (Banten : Talenta Pustaka Indonesia, 2009), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lingkup penelitian ini terhadap pelaksanaan usaha pengolahan air gambut oleh BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Kunder Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Kunder, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pengolahan air gambut oleh BUM Desa Bina Usaha Sejati.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terfokus. Muhammad Hatta menjelaskan “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukan, peneliti tidak puas hanya melihat saja melainkan peneliti ingin mengetahuinya lebih dalam lagi”.¹⁰

Winarso Surakhmat mengatakan “Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti di lalui dengan jalan semestinya apabila akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan”.¹¹

Berdasarkan pendapat diatas dan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Kunder Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa?

¹⁰ Muhammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : Mutiara, 2004), h. 9.

¹¹ Winarso Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 2005), h. 105.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Kunder Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Dapat mengetahui bagaimana peran BUM Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Kunder Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 2. Dapat mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan BUMDes Bina Usaha Sejati dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dapat memberikan data dan informasi bagi pihak – pihak terkait terhadap pelaksanaan usaha pengolahan air gambut oleh BUM Desa Bina Usaha Sejati berdasarkan Peraturan Desa Kunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Serta mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Manfaat Akademis

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai peran BUM Desa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.¹² H.B Sutopo menjelaskan metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan penelitian lapangan, dengan melakukan survei secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹³ Penelitian hukum empiris, berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang – undangan). Namun demikian tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang - undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action*).¹⁴ Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁵

¹² Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2017), h. 5.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1982), h. 51.

¹⁴ Hajar M, *Model - Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), h.112.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Tepatnya pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati. Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah dikarenakan pada BUMDes Bina Usaha Sejati ini sebagai salah satu BUMDes yang memiliki berbagai program dalam upaya meningkatkan dana, namun belum pengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Narasumber Penelitian

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi. Dalam hal ini, narasumber adalah beberapa orang yang memiliki wewenang dalam pengelolaan BUMDes Bina Usaha Sejati dan beberapa masyarakat yang memiliki domisili di Desa Kundur yang mengetahui secara jelas kondisi yang berkaitan dengan tema atau topik yang sedang dibahas dalam wawancara penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1 Jumlah Narasumber Penelitian

No.	JABATAN	NAMA	JUMLAH
1	Pemerintah Desa	M. Ali Mashar,S.Sos Saringat, S.PI Winarto	3 Orang
2	Pengelola BUMDes	Edi Wicahyo Safar	2 Orang
3	Masyarakat anggota BUMDes	Budianto Abdul Rodok	2 Orang
4	Masyarakat Desa Kunder	Sumarni Komariah Firdaus	3 Orang
	Jumlah		10 Orang

4. Sumber Data

Dalam penelitian jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat, melalui penelitian.¹⁶

Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara atau interview langsung kepada responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2009), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁷ Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁸ bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan.
- e. Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa

2). Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2009), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap pbahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, surat kabar dan sebagainya.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal – hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda – benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.²² Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.24.

²² M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012), h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.²³ Hasil wawancara bukan termasuk pada bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam bahan non hukum atau tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada yang diwawancarai kemudian memberikan pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.²⁴

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Direktur/Ketua BUM Desa Bina Usaha Sejati, Kepala Unit, dan Masyarakat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil dari buku-buku, artikel-artikel, majalah hukum, dan jurnal sebagai referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk

²³ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 127.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2005), h.206.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif, yaitu dari bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.²⁵ Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode Induktif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika yang terdiri dari lima bab atau bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Desa Kundur dan BUM Desa .

BAB III LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang digunakan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: badan usaha, badan usaha desa, prinsip usaha desa, tujuan pendirian usaha desa, dan standar keberhasilan usaha desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian-penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan

²⁵ Suratman dan Philips, *Loc. Cit*

dengan Peran BUMDes Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BUMDes Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Upaya yang seharusnya dilakukan oleh BUMDes Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, serta saran - saran yang diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama di bidang Hukum Tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, dahulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan.²⁶

²⁶ <http://news.merantikab.go.id/web/profil/sejarah>, diakses Senin, 7 Juni 2021.

Selama terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti ini sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai Bupati adalah sebagai berikut :

1. Dr. H. Syamsuar M.Si (2009-2010)
2. Dr. H. Irwan Nasir, M.Si (2010-2020)
3. H. Muhammad Adil, SH. (2021-2026)

Visi :

Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul menuju masyarakat madani.

Misi :

- a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif
- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil pertanian, perikanan dan peternakan
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas
- e. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi
- f. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi
- g. Meningkatkan pembinaan mental spriritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

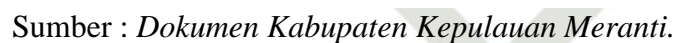
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau..

Kab. Kepulauan Meranti



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, dengan total wilayah seluas 3.707,84², cakupan wilayahnya yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Merbau. Wilayah Kepulauan Meranti beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 25-32°C.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara administratif, saat ini Kepulauan Meranti memiliki 9 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur, beribu kota di Sungai Tohor (20,17%). Kecamatan yang terjauh dari Kota Selatpanjang adalah Kecamatan Tasik Putri Puyu, beribu kota di Bandul (97 Km dari Selatpanjang).

3. Kondisi Demografi Kabupaten Kepulauan Meranti

Piramida penduduk Kepulauan Meranti pada tahun 2019 merupakan piramida penduduk muda berbentuk limas. Jumlah penduduk usia dibawah 24 tahun lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk usia tua, diatas 65 tahun. Ini artinya tingkat kelahiran lebih tinggi dari pada tingkat kematian.

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Meranti pada tahun 2019 adalah sebesar 0,63 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2018. Data BPS mencatat jumlah penduduk Kepulauan Meranti pada tahun 2019 adalah 183.297 jiwa. Dengan wilayah seluas 3.707,84 km², maka setiap km² wilayah rata-rata ditempati oleh 49 orang penduduk.

Sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Sex rasio penduduk di Kepulauan Meranti pada tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 105. Artinya pada tahun 2019, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.²⁷

²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, Dalam Angka 2019, (Meranti: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2019), h.7-8.

B. Gambaran Umum Desa Kundur

1. Sejarah Desa Kundur

Desa Kundur Sejarah Kundur memiliki dua versi yang pertama Kundur tersebut berasal dari suku akit, dimana suku akit tersebut sudah berpuluh-puluh tahu berada disana sebelum desa Kundur di sahkan. Nama desa Kundur menurut versi mereka berasal dari buah yang mirip dengan labu karena pada saat itu tumbuhan Kundur di Desa tersebut sangat banyak diwilayah ini. Hingga saat ini buah kundur tersebut juga masih banyak di jumpai dan biasanya diolah sebagai air kundur. Jadi, menurut versi pertama desa Kundur berasal dari nama buah yaitu buah kundur. Menurut versi kedua yaitu nama Kundur berasal dari bahasa jawa yang dibawa langsung oleh orang-orang jawa. Dimana, mereka merantau ke desa tersebut untuk mencari nafkah. Menurut bahasa Jawa, Kundur itu artinya “Pulang”. Maksudnya adalah, mereka bukan asli orang Kundur yang ingin pulang dan mengajak orang banyak. Jadi menurut versi kedua desa Kundur tersebut berasal dari bahasa jawa yaitu “Pulang”.²⁸

Desa Kundur memiliki tiga dusun atau RW yaitu Sidosari, Sidoharjo dan Pelayar hanya saja RTnya yang mengalami penambahan. Desa Kundur merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga masyarakat desa Kundur mampu mengembangkan desa tersebut salah satunya memiliki sumber daya alam berupa tanah yang subur. Masyarakat Desa Kundur rata-rata bermata

²⁸ Saringat, S.Pd (Sekretaris Desa), Wawancara, tanggal 20 Mei 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pencaharian sebagai petani untuk usia tua dan usia muda rata-rata sudah banyak yang merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan yang bergaji tetap.

Kondisi Geografis Desa Kundur

Penelitian ini berada di Desa Kundur. Desa Kundur adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dengan luas desa 9,8 Ha, ketinggian tanah dari permukaan laut 1-6,4 dengan curah hujan yang cukup dan suhu udara sekitar 30 s.d 36°C. Jarak dari ibu kota kecamatan berkisar ± 10 km dan jarak dari ibu kota kabupaten berkisar ± 25 km. Pada tahun 2020 masyarakat Desa Kundur berjumlah 363 KK dengan 1.319 jiwa dengan dibagi sebanyak 3 desa.

Batas-batas desa :

1. Sebelah timur : Desa Batang Malas
2. Sebelah Barat : Desa Tanjung Peranap
3. Sebelah Utara : Selat Rengit
4. Sebelah Selatan : Desa Tenan

Kondisi Demografi Desa Kundur

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Penduduk Desa Kundur Kecamatan Tebing tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan pada daftar isian data profil Desa Kundur tahun 2020 berjumlah 1513 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
721	792	1513

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan Meranti.*

Berdasarkan tabel II.1 diatas terdapat hasil presentasi laki-laki 47,7% dan perempuan 52,3%. Dimana jumlah penduduk sebanyak 1513 jiwa.

a. Suku

Suku merupakan sebuah identitas dari suatu desa. Dimana mayoritas masyarakat Desa Kundur merupakan suku Jawa. Tetapi ada beberapa suku lain juga. Secara sosial masyarakat yang ada di Desa Kundur tidak memiliki konflik walaupun menikah dengan beda suku. Dimana, masih ada suku yang belum memiliki kepercayaan. Dalam artian, mereka tetap menerima dari berbagai macam suku yang datang. Secara budaya, Desa Kundur tersebut memiliki beragam suku yakni suku jawa, melayu, akit dan lainnya.²⁹

b. Agama

Secara agama, masyarakat Desa Kundur mayoritas beragama islam, dan tidak jarang ada agama lain seperti agama kristen dan budha. Bahkan masih ada yang belum memiliki agama dan hanya memiliki kepercayaan. Tetapi masyarakat Desa Kundur tetap menjalin tali silaturahmi walaupun berbeda agama atau kepercayaan. Adat istiadat yang ada di Desa Kundur secara umum masih mengikuti kebiasaan mayoritas agama yang ada

²⁹ M. Ali Bashar, S.Sos (Kepala Desa Kundur), Wawancara, tanggal 20 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disana yaitu agama islam, seperti kegiatan pengajian dimasjid atau musholla, melakukan kegiatan kenduri untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, dan lain-lain yang masih sesuai dengan kebiasaan agama Islam. Di Desa Kundur juga memiliki tempat ibadah lain yakni Vihara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel agama dan sarana prasarana ibadah berikut:

Tabel II.2
Agama Desa Kundur

AGAMA	JUMLAH
Islam	1336
Kristen	10
Katolik	0
Hindu	0
Budha	167
Konghucu	0

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan Meranti.*

Berdasarkan hasil presentasi tabel diatas terdapat 6 (enam) agama. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dimana mayoritas agama islam sebesar 88,3%, agama kristen 0,7% dan agama budha 11%. Dan memiliki 3 masjid, 5 mushola dan 1 vihara.³⁰

³⁰ Sumber : *Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan Meranti.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perekonomian

Berdasarkan wawancara bersama Bapak M.Ali Mashar,S.Sos selaku Kepala Desa Kundur. Desa Kundur adalah salah satu desa yang dikatakan desa berkembang yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dengan masyarakat di Desa Kundur mayoritas bermata pencaharian sebagai tani karet, sagu dan sayur. Dimana, secara data statistik Desa Kundur berada nomor 2 setelah Desa Alai yang masih dikategorikan berkembang, dimana masih terdapat beberapa bantuan seperti bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai dan lainnya.

Tabel II.3

Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
PNS	9
TNI/Polri	1
Swasta	199
Pedagang	28
Tani	450
Pertukangan	10
Buruh Tani	70
Pensiunan	1
Jumlah Total	768

Sumber : Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa yang memiliki pekerjaan sebanyak 768 orang dengan mayoritas mata pencaharian desa Kundur adalah sebagai petani yaitu sebanyak 58,6%.

d. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan oleh suatu kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian guna untuk mendapatkan ilmu. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.³¹

Seperti di Desa Kundur, pada tahun 2020 rata-rata pendidikan akhir masyarakat Desa Kundur sudah mulai meningkat yakni rata-rata tamatan SMA atau sekolah menengah atas dan pendidikan akhir orang tua minimal sekolah dasar. Pada sekarang ini masyarakat Desa Kundur sudah menganggap pendidikan itu penting, yang mana sudah banyak anak-anak yang pergi merantau untuk kuliah di luar daerah.

Tabel II.4
Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Taman Kanak-kanak	112
Sekolah Dasar (SD)	567
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	356
Sekolah Menengah Atas (SMA)	320
Akademi (D1-D3)	20
Sarjana (S1-S3)	128
Jumlah	1513

Sumber : *Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan Meranti.*

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, diakses Selasa 8 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat di presentasikan bahwa rata-rata masyarakat Desa Kundur sudah menganggap pendidikan itu penting, sehingga sudah mulai banyak anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. seperti terlihat pada tabel II.4 bahwa lulusan SMA sebanyak 21,1%, lulusan D3 sebanyak 1,9%, dan lulusan sarjana sebanyak 8,4%. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa masyarakat desa Kundur sudah mengedepankan pendidikan.³²

Untuk memperlancar mutu pendidikan di Desa Kundur, maka perlu adanya tempat untuk belajar. Untuk lebih jelas dapat dilihat sarana dan prasarana pendidikan tabel II.5 berikut:

Tabel II.5
Sarana Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Negeri dan Swasta		
		Gedung	Guru	Murid
1	Kel. Bermain	1	2	5
2	TK	1	5	32
3	Sekolah Dasar	2	26	138
4	SMP	1	14	73
5	SMA	1	15	51
6	Akademi	-	-	-
7	Institut/Perguruan Tinggi	-	-	-
	Jumlah	6	62	299

e. Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan di Desa Kundur bahwa desa tersebut masih belum memiliki rumah sakit atau puskesmas. Dimana, dengan demikian akan meyulitkan masyarakat tersebut. Masyarakat desa Kundur memanfaatkan rumah sakit di desa lain seperti di desa Alai untuk berobat.

³² Sumber : Dokumen Kantor Desa Kundur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya. Oleh karena luas dan banyaknya urusan pemerintah sehingga tidak mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat, dengan demikian urusan Negara memerlukan adanya berbagai alat kelengkapan Negara membantu terwujudnya tujuan Negara. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan hanya disebutkan pemerintahan daerah yang biasa juga disebut dengan pemerintahan setempat atau pemerintahan lokal (*local government*). Oppenheim dalam bukunya yang berjudul *Het Nederlendsch gementerecht* memberikan beberapa ciri – ciri pemerintahan daerah yakni:

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada Negara.
- b. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus Negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya.
- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.³³

Pengertian pemerintahan daerah ditemukan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Secara jelas dipaparkan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³⁵

Sejarah otonomi daerah di Indonesia sudah dimulai pada zaman kemerdekaan. Sejarah ini sempat terhenti saat diterapkannya sentralisasi pemerintahan pada era orde baru. Kemudian, perjalanan desentralisasi dilanjutkan seiring dengan berkembangnya era reformasi di Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk

³³ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h.10.

³⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2.

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan berdasarkan undang- undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.³⁶

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing - masing mempunyai pemerintahan daerah, yang mana dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.³⁷

Ruang lingkup pemerintahan daerah terdapat pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah :

- a. Pemerintah daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi dan DPRD Provinsi.
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Dan dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah.³⁸

³⁶ Adissya Mega, Budi Ispriyarso, *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 15 No.1, Tahun 2019, h. 152.

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2.

³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah diatur dan disepakati dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2.
- b) Ketetapan MPR Ri Nomor XV/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.
- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).³⁹

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada empat, yaitu:

- a) Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat

³⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Asas , diakses pada tanggal 17 Juni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
- c) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- d) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁴⁰

B. Sistem Pemerintahan Desa

Berdasarkan teori Hukum Tata Negara, pembagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal adalah pembagian tugas dan atau wewenang menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan petugas lain yang ruang lingkupnya berbeda.⁴¹

Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatannya yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau wewenangnya mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatannya dengan petugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukannya dapat melimpahkan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi dalam konsep Negara Kesatuan, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertikal.⁴²

Penyelenggaraan pemerintahan desa di bumi nusantara ini bukan adopsi dari sistem negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia.

Keaslian itu diakui oleh van vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht overze* bahwa pada tahun 1996 ketika kapal berbendera Belanda yang pertama memasuki perairan kepulauan Indonesia wilayah ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang “liar dan kosong”. Di sana terdapat setumpuk lembaga- lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa, persekutuan-persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.⁴³

Pemerintahan Desa sebenarnya tidak ada ketentuan Perundangan Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan Daerah Otonom, namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat adalah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 144

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketentuan ini dapat kita menyimpulkan bahwa kalimat "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat". Ini dapat diartikan bahwa Desa adalah daerah otonom karena adanya kewenangan yang diberikan perundangan-undangan kepada desa untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat desa setempat, yang mana kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri merupakan inti makna dari istilah otonomi.⁴⁵

Secara umum desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan 'peradaban' yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian.⁴⁶ Penyebutan desa lebih akrab ditelinga orang Jawa, Madura dan Bali, Dusun dan Marga (sumatraa selatan), Dusundati (Maluku), Kuta atau Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Aceh menyebutnya Gampong.

Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan. Dengan demikian, di dalam kota juga dikenal sebutan desa. Pengertian desa seperti itu diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Menurut Kartohadikoesoemo (1965), desa dalam arti administratif adalah suatu

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

⁴⁶ Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, (Jakarta : Laper Pustaka Utama, 2001) h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁴⁷

Sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda pada tiap-tiap bagian daerah seperti di daerah Tapanuli Kepala Desa disebut Kepala Nagari, di Sumatra Selatan disebut dengan nama Pesirah, di daerah Jawa disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut Tembukung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di berbagai daerah di Papua disebut Kurano. Masih banyak lagi sebutan yang bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama.⁴⁸

Susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu :⁴⁹

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Selain dari pada itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa yaitu :

⁴⁷ Ramlan, Eka Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa* (Medan : Enam Media, 2021) h.

⁴⁸ Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, (Bandung : CV Fokus Media, 2007) h. 9

⁴⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif berserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).⁵⁰

Pengertian desa secara sosiologis digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam.⁵¹

Dari sudut pandang politik dan administrasi pemerintahan, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Pengertian tersebut termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya yaitu dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan kemudian diatur dalam Undang-Undang

⁵⁰ *Ibid*, h.10

⁵¹ Suhartono, dkk, *Op. Cit*, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam pengertian ini, masih belum tergambarkan secara jelas mengenai kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa.⁵²

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat bertambah. Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang merealisasikan aspirasi yang berkembang. Dari berbagai pengertian desa tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan ada beberapa ciri desa secara umum:⁵³

1. Desa umumnya terletak sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat
4. Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat dari pada kota.

⁵² *Ibid*, h. 14

⁵³ *Ibid*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵⁴

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa “Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Penyelenggaraan Urusan Bidang Eksekutif yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁵⁵ Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵⁷

C. Sumber Pendapatan dan Belanja Keuangan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Di dalam buku Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut:

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵⁶ H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2007) h. 93

⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.

Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.⁵⁸

Sumber pendapatan desa dijelaskan dalam Bab VIII Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang Keuangan dan Aset Desa. Sumber pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa (yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

⁵⁸ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011) h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yang besarnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.

Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana desa adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai mandat UU Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Untuk memastikan bahwa dana desa yang diberikan tidak diselewengkan dan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal, maka pemerintah tingkat pusat hingga pemerintah daerah rutin melakukan evaluasi mulai dari tahap perencanaan hingga sampai tahap laporan pertanggungjawaban. Proses evaluasi tingkat pusat dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Jika terdapat penyimpangan dalam pengalokasian dana desa, pemerintah akan memberikan sanksi. Penggunaan dana desa merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat.

Pemerintah menetapkan penggunaan dana desa setiap tahun. Berikut ini merupakan beberapa prinsip penggunaan dana desa :⁵⁹

1. Prinsip keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
2. Prinsip kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, leboh dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Prinsip kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Prinsip partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

⁵⁹ Kemenkeu RI. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2017) h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Sesuai dengan Permendes Nomor 19 tahun 2017 adalah memprioritaskan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup dan lainnya. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, mengembangkan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak III, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya serta pada bidang kegiatan lainnya. Dana desa diperbolehkan untuk kegiatan yang bukan menjadi prioritas penggunaan dana desa sepanjang masih dalam kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa. Dana desa tidak diperbolehkan untuk membayar gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa karena gaji mereka sudah dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa disebut dengan dengan keuangan desa. Keuangan dana desa dikelola sedemikian rupa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dasar hukum pengelolaan dana desa adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun asas pengelolaan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan keuangan desa adalah satu tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Rencana keuangan desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Beberapa kewenangan kepala desa antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa.
 - b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- PTPKD merupakan salah satu unsur perangkat desa yang merupakan pelaksana teknis pengelola keuangan desa. PTPKD bertugas membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.

Menetapkan perugas yang memungut penerimaan desa.

Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa. Tugas sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan APBDesa.
- 2) Menyusun Raperdes APBDesa.
- 3) Menyusun perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan APBDesa.
- 5) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa.
- 6) Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

D. BUMDes Sebagai Sektor Pendapatan Desa

Salah satu hak otonomi yang dimiliki oleh Desa adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang mana Pendapatan Asli Desa tersebut dapat digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes juga ditujukan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa.⁶⁰

⁶⁰ Sudiarto dkk, *Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Di Desa Bagek Polak*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, Desember 2019, h. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁶¹

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pengertian lain menjelaskan bahwa:

- a. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau Kerja sama antar-Desa.
- c. BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan, dan aksi kolektif.
- d. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa bersifat kolektif.
- e. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.⁶²

BumDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambahan dalam pengelolaan aset ekonomi desa.
- b. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar dalam jaringan pasar.
- c. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan.
- d. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.

⁶² Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bumdes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BumDes juga memberikan sumbangan bagi peeningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Terdapat beberapa ciri utama yang membedakan BumDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat;
- c. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat;
- d. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa;⁶³

Tujuan Pendirian BUMDes sebagaimana disebutkan dalam Peraturan

Menteri desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;

⁶³ *Ibid*, h.13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan.
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.⁶⁴

Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁶⁵

E. Hubungan BUMDes dan PAD

Tujuan dari pendirian BUMDes sangat berhubungan erat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa. Di samping itu pendirian BUMDes ini mempunyai

⁶⁴ Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

⁶⁵ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development, Volume V No. 1 Februari 2014, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi BUMDes keseluruhan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi wilayah perdesaan untuk mengetahui peranan bumdes dalam peningkatan pendapatan asli desa ada beberapa indikator sebagai berikut:

1. BUMDes sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa kemudian untuk dilaksanakan.
 2. BUMDes yang merencanakan usaha apa yang akan dibangun sebagai program yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa.
 3. BUMDes memfasilitasi pembangunan usaha untuk peningkatan pendapatan. BUMDes ikut menentukan usulan yang ingin dibuat bentuk peningkatan pendapatan asli desa. BUMDes yang lebih mengetahui badan usaha apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa.
- BUMDes sebagai Mediator dalam perencanaan badan usaha adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan BUMDes tersebut, dan juga membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tanpa dengan memutuskan masalah itu. guna meningkatkan pendapatan asli desa.
- Kegiatan BUMDes mendukung pengembangan kegiatan usaha, contohnya dengan menyambungkan usaha air bersih ke Desa lain supaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan dan pendapatan asli desa bisa meningkat kedepannya dan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. pengembangan kegiatan usaha tidak akan berjalan bila tidak adanya dukungan dari BUMdes serta dari masyarakat, sebab tanpa adanya dukungan dari BUMDes usaha tersebut tidak bisa berjalan sesuai yang diinginkan. BUMDes Desa Lanjut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan pertumbuhan ekonomi.

Peranan BUMDes sebagai Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat, pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang badan usaha desa lanjut kedepannya, supaya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa. Bentuk- bentuk motivasi yang diberikan BUMDes Desa Lanjut yaitu bagaimana cara masyarakat maupun segenap aparat pemerintah desa bisa merawat, menjaga, dan mengajak masyarakat untuk supaya lebih meningkatkan lagi usaha yang ada di Desa Lanjut itu sendiri.

BUMDes sebagai Dinamisator dalam mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli desa sangat jeli dalam pemantauan dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis. Bentuk dari dinamisasinya menepatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan badan usaha milik desa dan bertanggung jawab melayani masyarakat.⁶⁶

⁶⁶ Ade Eka Kurniawan, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume V Nomor 1, h.29

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Kundur telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa dan menjadi salah satu upaya dari pemerintah Desa Kundur dalam mengembangkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa Kundur.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu : *Pertama*, Sebagian masyarakat yang masih kurang peduli terhadap BUMDes. Dengan kurangnya kesadaran tersebut dapat mengurangi dari makna tujuan dibentuknya BUMDes di Desa Kundur. *Kedua*, Terbatasnya tenaga kerja. Terjadinya penambahan tenaga kerja dikhawatirkan akan menambah dana pengeluaran, hal itu dikhawatirkan dapat menghambat jalannya BUMDes tahun-tahun kedepannya. *Ketiga*, Lambannya pemasaran untuk penjualan air dalam kemasan. Hal ini terjadi karena kurangnya usaha dari pihak desa dan juga warga masyarakat untuk mempromosikan atau mengeksport produk air minum dalam kemasan tersebut ke desa-desa lain ataupun menjualnya hingga ke pusat kota atau ibu kota kabupaten. Sehingga

produk air dalam kemasan tersebut untuk saat ini hanya dikonsumsi oleh warga desa Kundur pada umumnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Kundur agar bisa berkoordinasi lebih baik lagi kepada seluruh pengurus BUMDes dan memberikan dukungan serta perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes Bina Usaha Sejati, baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasehat, motivasi, saran, serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat desa.
2. Dalam menjalankan dan mengelola BUMDes tentunya terdapat faktor - faktor penghambat, baik itu dari segi internal dan eksternal, maka dari itu alangkah lebih baiknya pengelola BUMDes memusyawarahkan tersebut kepada aparatur desa dan masyarakat desa demi kelancaran pengelolaan dan tercapai tujuan dari pendirian BUMDes tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, *Dalam Angka 2019*. Meranti: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti. 2019.
- Djamil, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ghony, M. Djuandi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ru Media. 2012.
- Hajar M, *Model - Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru : Suska Press. 2015.
- Hartono, *Metode Penelitian*. Pekanbaru : Anafah Publishing. 2011.
- Hatta, Muhammad. *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Mutiara. 2004.
- Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga, 2011.
- Kemenkeu RI. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2017.
- Kurniawan, Mahendra dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta : Kreasi Total Media. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Pranamedia Group. 2005.
- Masduhin, Ivan. *Peraturan dan Keteraturan. Banten* : Talenta Pustaka Indonesia. 2009.
- Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.
- Rajab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ramlan, Eka Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan : Enam Media, 2021.
- Sadu, Wasistiono dan Irwan Tahir. *Prospek Perkembangan Desa*. Bandung : CV Fokus Media. 2007.
- Satori , Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2014
- Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum*. Jakarta : UII Press. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 2009.
- Suhartono, dkk. *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonoi Daerah*. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama. 2001.
- Sujarweni , V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.
- Surakhmat, Winarso. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. 2005.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Meodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi. 2017.
- Widjaja, H.A.W. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

B. Jurnal

- Agunggunanto, Ery Yusuf, dkk. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." Volume 13. Nomor. 01. (2015): h.70.
- Budiono P. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor)." *Jurnal Politik Muda*. (2015): h. 116-125.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Uoaya Dalam Hafiez, Sofyani." Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *JIA*. Volume 5. Nomor 2. (2020): h. 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Gunawan K. “Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi.” *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*. (2011): h. 61-72.
- Kurniawan, Ade Eka, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume V Nomor 1, h.29
- Ridlwan, Z. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8., Nomor. 3. (2014): h. 424.
- Sudiarto dkk, *Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Di Desa Bagek Polak*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, Desember 2019, h. 218.
- Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.” *Journal of Rural and Development*. Volume 5. Nomor 1. (Februari 2014): h. 2.
- Mega Adissya, Budi Ispriyarso, *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 15 No.1, Tahun 2019, h. 152.

C. Peraturan Perundang - Undangan

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. Kamus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001

E-Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>, diakses tanggal 8 Juni 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Asas , diakses tanggal 17 Juni 2021.

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses tanggal 17 Juni 2021.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pabrik Pengolahan Air Gambut BUMDes Bina Usaha Sejati Desa Kndur



Tabung Air Baku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabung Saluran Air



Tangki Air Sudah Jadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mesin Pembuatan Air Minum dalam Kemasan

Wawancara dengan Perangkat Desa dan Beberapa Warga Desa Kundur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Peran Badan Usaha Bina Usaha Sejati dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**, yang ditulis oleh :

Nama : Alde Wissiana
NIM : 11727200002
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Nurhidayat, SH., MH

Penguji II
Lysa Anggraini, SH., MH

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ALDE WISSIANA
 NIM : 11727200002
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Judul : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SEJATI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA KUNDUR NOMOR 4 TAHUN 2017 DI DESA KUNDUR KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pembimbing : Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 November 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 April 2021

Un 04/F.I/PP.00.9/3323/2021

Braza
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ALDE WISSIANA
NIM	: 11727200002
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa kundur, kecamatan Tebing tinggi barat, kabupaten kepulauan meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : Peran badan usaha milik desa bina usaha sejati dalam meningkatkan pendapatan
asli desa berdasarkan peraturan desa kundur nomor 4 tahun 2017 di desa kundur kecamatan
tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tak Dilarang Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. dan mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. dan mengutipnya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41135
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.007/FPM.00.923323/2021 Tanggal 6 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | ALDE WISSIANA |
| 2. NIM / KTP | : | 11727200002 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN BANDAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SEJATI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA KUNDUR NOMOR 4 TAHUN 2017 DI DESA KUNDUR KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KUNDUR KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 April 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KANTOR KEPALA DESA KUNDUR

Jalan Sidoharjo, Desa Kundur (0763).....Kode Pos 28763

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor : 146/020009-SS/26

Kepala Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti,
dengan ini memberikan izin Riset kepada :

Nama : **Alde Wissiana**
NIM/KTP : 11727200002
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peranturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Lokasi Penelitian : Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya,
atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Dibuat di : Desa Kundur
Pada Tanggal : 30 Juli 2021

KEPALA DESA KUNDUR
KEC.TEBING TINGGI BARAT

M. ALI MASHAR, S.Sos





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSP/VI/2021/SKP/54

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41135 Tanggal 30 April 2021, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama :
 NIM/KTP :
 Program Studi :
 Jenjang :
 Alamat :
 Judul Penelitian :

: **Alde Wissiana**
 : 1111727200002
 : Ilmu Hukum
 : S1
 : Pekanbaru
 : **Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kunder Nomor 4 Tahun 2017 Di Desa Kunder Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**
 Lokasi Penelitian : Desa Kunder Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Demikian Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 10 Juni 2021

**PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



TUNJIARTO, M.Pd

Pembina (IV/a)

NIP. 19711124 200312 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Kunder Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



BIOGRAFI PENULIS

Alde Wissiana, lahir pada tanggal 16 April 1999 di Selatpanjang, Kab. Kep. Meranti. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Bisman dan Ibu Misdalifa. Penulis bertempat tinggal di Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari TK Pertiwi di Selatpanjang,

Kabupaten Kepulauan Meranti dan selesai pada Tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 035 Selatpanjang kota dan selesai pada Tahun 2011, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Selatpanjang pada Tahun 2011 dan selesai pada Tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi pada Tahun 2014 dan selesai pada Tahun 2017, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Syariah dan Hukum dan mengambil Program Studi Ilmu Hukum pada Tahun 2017 dan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada Tanggal 19 Oktober 2021, penulis melakukan sidang Munaqasyah Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi **“Peran Badan Usaha Bina Usaha Sejati dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”** dan dinyatakan lulus dengan Ipk 3,43 dengan predikat Sangat Memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).